



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI,
SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 - 4 Jakarta 10710
Telepon: 021-3500901 ; Faksimile: 021-3441261**

**NOTULENSI PERJALANAN DINAS
RAPAT TIM PELAKSANA, 5 NOVEMBER 2019
TENTANG PEMBAHASAN PENYUSUNAN LAPORAN EITI 2017**

Acara Rapat Tim Pelaksana EITI ini dihadiri oleh:

1. Pemerintah Pusat : Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM (Pusdatin, Ditjen Migas), BPKP, Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak), SKK Migas,
2. Perusahaan dan Asosiasi : Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA)
3. Masyarakat Sipil : Publish What You Pay
4. Administrator Independen : PT Veda Praxis
5. Sekretariat EITI

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Rapat Tim Pelaksana dilaksanakan pada tanggal 05 November 2019 di Hotel Morrissey Jakarta tentang “Pembahasan Penyusunan Laporan EITI 2017 Terkait Standar EITI 2019”. dibuka oleh Asisten Deputi Bidang Industri Ekstraktif selaku Sekretaris Tim Transparansi, Ahmad Bastian Halim.

C. Pemaparan

1. Edi Effendi – Sekretariat EITI

- Terimakasih Bapak dan Ibu yang telah hadir pada acara hari ini dan ketersediaan waktu Bapak dan Ibu untuk hadir pada rapat Tim Pelaksana tentang “Pembahasan Penyusunan Laporan EITI 2017 Terkait Standar EITI 2019”, perkenalkan saya Edi Effendi Tedjakusuma selaku Tim Leader di Sekretariat EITI Kemenko Perekonomian, tidak perlu menunggu lama langsung saja kami persilahkan Tim Administrator Independent untuk memaparkan.

2. Dadan Gunawan Syawal – Manager IA

- Good Afternoon, terimakasih kesempatannya kami akan mempresentasikan progress report dari Administrasi Independent sampai dengan hari kemarin, Introduce of some first to EITI Global so we are from the consortium of Indonesian Mining Institute and also Veda Praxis, Veda Praxis is data Government specialist in Indonesia and then IMI is Indonesian Mining Institute.
- Mari kita mulai dengan timeline, ini adalah timeline ideal yang diberikan oleh Sekretariat sebelumnya jika kita lihat hari ini tanggal 05 November 2019 kita MSG Meeting kemudian next nya adalah tanggal 15 November 2019 laporan rekonsiliasi awal kemudian tanggal 20 November 2019 kita ada MSG Meeting lagi, tanggal 29 November 2019 kita ada draft laporan EITI 2017. Kemudian bulan Desember tanggal 3 ada MSG Meeting lagi, kemudian tanggal 9 Desember 2019 ada Final Laporan EITI 2017, di tanggal 11 dan 18 Desember 2019 MSG Meeting untuk memformalkan Finalisasi Laporan.
- Nanti di slide-slide terakhir akan ada Request dari Administrator Independent untuk perpanjangan waktu setelah membuat laporan, converhen stiffness saya rasa tadi Bapak-bapak sudah diingatkan tentang data yang sudah dilaporkan tahun 2017 ini saya perlihatkan kembali bahwa untuk migas ada 77 perusahaan all population migas walaupun nanti ada beberapa yang sudah tutup artinya secara pajak maupun PNBPN maka rich kita adalah 1% untuk migas, kemudian untuk perusahaan minerba ada 122 perusahaan dari total populasi 1.762 perusahaan minerba kita mengambil 122 perusahaan untuk di collect datanya dengan representasi 93% dari total PNBPN.
- Kemudian apa yang sudah kita lakukan untuk migas sampai hari ini, saya mengingatkan kembali bahwa saat sosialisasi tanggal 3 dan tanggal 8 untuk migas tidak hadir sebanyak 7 perusahaan ini cukup baik kehadirannya 70 perusahaan hadir 91% hadir saat sosialisasi, namun sosialisasi berbeda dengan submit, jadi kehadiran belum tentu berbanding lurus dengan submit, hingga hari ini sudah terkumpul 66 dari 77 perusahaan secara softcopy sudah 84,42% sudah submit. Bagaimana dengan 11 perusahaan yang belum submit kita juga sudah mengingatkan kepada mereka baik lewat email, telepon dari respon ini ada 4 perusahaan yang sedang mengerjakan, kemudian ada dari CNOOC SES yang belum mengerjakan seharusnya setelah kami telepon sudah mengerjakan, kemudian yang sudah diangkat ada 6 perusahaan dan terakhir jika perusahaan tidak mengangkat telepon maka kita akan visit mereka, dan ada 3 perusahaan hingga kemarin EMP tidak dapat ditemui namun alhamdulillah tadi pagi mereka menyampaikan jika mereka akan submit, kemudian ada 2 perusahaan yang tidak dapat ditemui yaitu JOB Pertamina terdiri dari 2 yaitu Jadestone Energy Ok dan Golden Spike Indonesia, kemudian yang secara eksklusif menyampaikan secara verbal yaitu adalah JOB Petrochina East Java.
- Untuk minerba waktu sosialisasi yang tidak hadir hampir 50% kemudian dari 122 sampai dengan hari ini sudah submit 51 perusahaan atau 41.8% dan hanya mengingatkan kembali tahun lalu dibawah 80%, dari 71 yang belum submit dari 122 dikurangi 51 kita sudah broadcast message juga dan kitasudah telepon dan menunjukkan 22 dari 71 itu sedang mengerjakan kemudian tidak ada tanggapan sama sekali ada 34 yang lokasinya diluar jakarta kemudian 5 yang di jakarta, kemudian yang tidak ada datanya ada 4 di Kalimantan dan 2 Jakarta kemudian yang tidak berproduksi ada 4 perusahaan, namun

Jika dibandingkan dengan data minerba tahun lalu agaknya banyak diantaranya 30 lebih adalah pendatang baru, memang cukup challenging untuk kami dan yang tidak ada tanggapan kita memutuskan untuk mengirimkan orang/tim ke Kalimantan kunjungan visit untuk bertemu dengan Pemda, Dinas, dan juga pendatang yang tidak bisa di hubungi ini.

- Kemudian untuk keperluan DJP kita sudah mengumpulkan hardcopy dan lembar otorisasi untuk DJP membuka data, untuk migas formulir Letter of Otorization (LO) yang sudah diterima itu 55 dan dalam bentuk softcopy 66 dan 11 belum diterima hardcopy, namun kami akan cek lagi ke sekretariat karena mereka ada yang langsung mengirimkan ke sekretariat, dari 55 perusahaan per 18 oktober kami sudah mengirimkan formulir LO ke DJP sebanyak 41 dan 29 oktober sebanyak 3 dan 5 november sebanyak 11 totalnya ada 55, Dari 11 yang belum diterima hardcopynya bisa dilihat daftar perusahaannya
- Kemudian untuk minerba sudah diterima sebanyak 41 untuk hardcopy dan sudah diterima sebanyak 51 dalam bentuk softcopy dan 10 belum diterima. Kami juga sudah sampaikan ke DJP hardcopynya 18 oktober sebanyak 15, 29 oktober sebanyak 15, dan 5 november sebanyak 11.
- Ini merupakan perbandingan data yang sudah kita collect dan dibandingkan dengan angka LKPP. Menurut LKPP dari Migas total penerimaan negara dari tahun 2017 sebanyak 151 triliun dan dari minerba itu 37.7 triliun, sementara yang sudah kita collect hingga hari ini migas lebih besar dari LKPP nya dan ini sedang kami selidiki namun karena angka ini sudah di audit oleh BPKIP jadi saya menduga ini ada error saja didalamnya. Untuk minerba lebih revenue table angkanya dari 37 triliun di LKPP kita sudah berhasil collect 23.6 triliun sudah 62%.
- Kami sampaikan juga status penyampaian formulir instansi pemerintah, pada instansi DJA kami telah menyampaikan pada 15 oktober 2019 dan tanggapan dari DJA mereka akan mengirimkan formulirnya ke tim IA pada tanggal 8 oktober 2019. Kemudian DJP ada 86 LO pajak sudah dikirimkan ke tim IA pada tanggal 5 oktober 2019. Kemudian Ditjen Perbendaharaan masih belum di disposisi dan untuk yang lainnya sudah under control.
- Kemudian kami sampaikan juga formulir pemda dan dinas ESDM daerah, untuk pemda Riau kami sudah sampaikan hardcopynya tanggal 18 oktober 2019 dan softcopynya 23 oktober 2019 dan berdasarkan informasi dari pemda Riau sedang dalam tahap pengisian form migas dan minerba. Kemudian pemda Sumatra Selatan sedang dalam tahap disposisi. Dan pemda Jawa Timur juga sedang dalam tahap disposisi, dan sisanya dalam under control.
- Untuk BUMN hardcopy sudah kami sampaikan 30 oktober 2019 dan softcopy pada tanggal 23 oktober 2019 namun belum ada respon apapun dari Pertamina sebagai tambahan Pertamina menyampaikan bahwa ada penggantian PIC menurut dugaan saya masih dalam proses disposisi. Kemudian INALUM mereka akan menyampaikan laporannya pada minggu pertama bulan november 2019, mereka sudah mengirimkan namun bukan sebagai holding kita anggap mereka belum mengembalikan dan kita sedang menghubungi lagi INALUM, karena data yang diminta ini kalau dilihat permintaan EITI Global memang banyak permintaan mengenai penyertaan modal pemerintah akibat holdingsasi data ini juga akan kita gunakan untuk laporan kontekstual untuk menanggapi holdingsasi untuk menanggapi regulasi dan sebagainya.

Bahkan kereta api sudah jauh-jauh hari mengirimkan sejak 30 oktober mereka sudah selesaikan.

- Dalam rangka apa kereta api mengirimkan laporannya? Dalam transportasi seperti kereta api yang di Bukit Asam, Tanjung Enim karena itu dianggap pendapatan negara lewat BUMN. Oke cukup jelas untuk rekonsiliasi ya, selanjutnya kontekstual akan dipaparkan oleh Pak Ketut, dipersilahkan.

3. I Ketut Pradipta Wirabudi – Project Manager

- Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, kita akan membahas status dan hasil pekerjaan kontekstual, perumusan kerangka laporan kontekstual 2017 kita akan tetap mengacu kepada EITI value chain, contract and licences, production, revenue collection, revenue allocation, social and economic contribution ini yang akan kita pegang sebagai acuan yang pertama, turunannya adalah EITI Standar 2016 yang mana di adopt oleh pemerintah melalui TOR administration independent 2017 namun misalkan nanti ada kebingungan kami akan tetap mengacu kepada EITI Value Chain itu yang menjadi pegangan kami dalam membuat kerangka kontekstual 2017.
- Adapun kerangka kontekstual 2017 ini kami akan buat menjadi 11 bab dimana bab pertama ada pendahuluan seperti biasa, bab kedua tata kelola industri ekstraktif kita mengcapture peraturan yang berlaku sejak 2016 sampai 2019 sesuai dengan kesepakatan kita Agustus 2019 hanya mengcapture saja, dan pembahasannya sesuai dengan regulasi yang berlaku ada di bab 3, 4, 5, 6, dan 7 dimana membahas implementasi dari regulasi yang kita bahas di bab kedua, yang mana bab ketiga itu perizinan dan kontrak, kemudian ada kontribusi industri ekstraktif dan sebagainya, adapun tambahan dari kami 3 bab terakhir yang 8, 9, dan 10 dimana kita akan membahas sistem teknologi informasi terintegrasi industri ekstraktif, kemudian reformasi industri ekstraktif ada hilirisasi dan sebagainya, kemudian EITI standar 2016 dan masuk ke rekomendasi.
- Apa yang berbeda dari laporan EITI kontekstual sebelumnya, di bab kedua kami tidak akan membahas detail seperti yang sebelumnya data regulasi kita hanya capture yang baru terbit dari 2016 sampai 2019, kemudian di bab empat kita susun berdasarkan migas dan non migas seperti semua cadangan, eksplorasi, produksi, ekspor, kontribusi dalam perekonomian dan penerimaan negara dan itu tetap berdasarkan value chain EITI masing-masing kita akan bahas dengan urutannya seperti itu, kemudian untuk bab enam kita arubah judul menjadi Peranan Pemerintah Melalui BUMN dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Industri Ekstraktif tadi sudah dikatakan dari tim EITI Internasional bahwa sebenarnya Indonesia itu sudah lebih expand dari pada swastanya dari 4 yang di minerba sudah go publik dan dari migas PGN sudah masuk ke Pertamina, PGN juga sudah masuk ke Elnusa dan PGN juga go publik sudah menunjukkan dari transparansi dan akuntabilitas sudah dilaksanakan. Kemudian bab sembilan mengenai reformasi industri ekstraktif dan bab sepuluh kita melakukan gap analisis atas standar 2016 ke 2019.
- Kemudian pembahasan tiap bab, bab 1.1 pendahuluan subject nya tentang Industri Ekstraktif Transparansi Inisiatif, kemudian bab 1.2 EITI di Indonesia, bab 1.3 Persyaratan untuk negara pelaksana EITI. Kemudian yang tata kelola industri ekstraktif tentunya hirarki di Indonesia bermula dari undang-undang 45 pasal 33, kemudian gambaran kegiatan hulu dan hilir industri migas dan minerba, instansi pemerintah terkait industri ekstraktif dan keempat kerangka industri ekstraktif di Indonesia kita lihat yang di sisi kanan itu acuannya dari EITI Standar.
- Bab tiga perizinan dan kontrak sub satunya ada isu migas PSC dan Gross Split kemudian Open Bidding, Limited Offering dan sebagainya ini kita sudah membahas soal isunya.

Kemudian sektor minerba proses lelang untuk konsesi-konsesi baru yang ternyata tidak berhasil tidak berjalan dengan baik secara langsung membuat kegiatan eksplorasi di Indonesia berhenti dan kita tahu bahwa untuk kegiatan mineral dan gas bumi itu tulang punggungnya adalah eksplorasi, kemudian Moratorium IUP, Mining Cadastre. Bab empat kontribusi industri ekstraktif dari migas isunya potensi penemuan cadangan migas baru jangka pendek, menengah maupun panjang kemudian EOR membantu penambahan cadangan baru dan dari sektor minerba isunya DMO, hilirisasi, perkembangan tingkat eksplorasi, transparansi penerimaan negara terutama yang berkaitan dengan internal pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkaitan dengan undang-undang pembagian distribusi pendapatan dari mineral. Diakhir diskusi kita masukkan rekomendasi hasil dari pembahasan itu.

- **Edi Effendi – Sekretariat EITI** : Hilirisasi isinya apa? Hilirisasi seperti value edit didomestik bagaimana prosesnya kendalanya pro dan kontranya dan apa dampaknya, seperti itu kira-kira.
- **Dadan Gunawan Syawal – Manager IA** : Dan mungkin administrator independent menyampaikan apakah hilirisasi di Indonesia berjalan atau tidak, karena ada teori-teorinya, apakah ada kebijakan atau insentif dari pemerintah, karena hilirisasi akan lebih banyak permasalahan di mainstreamingnya.
- Distribusi penerimaan negara dari industri ekstraktif, jadi kita akan membahas manajemen dari anggaran dan fiskal, kemudian transparansi anggaran dan publik investment integrity, contoh pembayaran minerba dari industri ekstraktif kepada pemerintah daerah, itu yang selalu menjadi masalah undang-undangnya jelas bahwa dari sekian persen ada kabupaten yang menghasilkan dan kepada provinsi namun kenyataannya itu selalu menjadi masalah untuk pemerintah daerah sendiri mereka menghitung bagaimana cara memonitornya dan mereka meminta bantuan dari DPR juga dan ada excess lainnya kita juga tambahkan disitu.
 - **Maryati – PWYP** : Yang tadi ada catatan chemical gap dari validasi yang DBH itu juga kita mencoba disini untuk menambah informasi dari gap itu jadi artinya dalam MSG ini kita sudah ada improvement, issue-isue nya mungkin boleh di catat dulu nanti saat presentasinya kira-kira teknisnya itu bagaimana.
 - **Dadan Gunawan Syawal – Manager IA** : Ada beberapa sudut pandang IA yang tidak hanya mengenai submit informasi, misalnya CSR itu perlu kami menyampaikan bahwa istilah mandatori CSR misalnya what is mandatory CSR in Indonesia? mungkin punya BUMN tapi tidak bisa semudah itu menerapkan mandatori CSR di Indonesia ketika tidak ada regulasi untuk private sector kami harus menyampaikan itu ke mereka.
- Oke kita lanjutkan, peranan pemerintah melalui BUMN dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan industri ekstraktif, Indonesia itu cukup unik hasil alamnya dikuasai oleh undang-undang negara tapi kita juga mau untuk diserahkan kepada BUMN dan BUMN itu sendiri go publik pemerintah masih memegang prioritas sebagai pemegang mandat dari undang-undang pasal 33.
- Yang tujuh tanggung jawab sosial dan lingkungan disektor migas dan sektor minerba. Kebijakan CSR yang bersifat wajib dan bersifat sukarela, aliran dana perusahaan untuk dana ASR (migas) serta dana reklamasi dan pasca tambang (minerba).
- Bab delapan ini reformasi industri ekstraktif ada ENDP, MOMI, MOMS ini suatu usaha yang baik dari pemerintah kendalanya bagaimana.
- Reformasi industri ekstraktif di sektor migas kita membahas improvement pada gross split, dan sebetulnya itu ada analisisnya, kemudian alih kelola terminasi ke pertamina, kemudian kewajiban menjual minyak ke pertamina dan selanjutnya Recovery. Untuk sektor minerba cukup banyak, ada moratorium IUP, sistem lelang, hilirisasi, divestasi,

keajiban PPM, pertambangan rakyat dan PETI ini juga suatu hal yang cukup menarik karena di undang-undang di fasilitasi dan kemudian digitalisasi. Untuk bab sepuluh EITI standar 2019, kita akan menjelaskan perbedaannya seperti gender equality sebetulnya kalau kita lihat di pertambangan minyak memang tidak tercature secara jelas, memang gender quality terfasilitasi dari perusahaan sendirikan bahwa perempuan memang lebih berat dan mereka mendapatkan beberapa fasilitas seperti cuti melahirkan, cuti datang bulan dan sebagainya.

- **Ermy – Article 33** : Kita harus tahu dulu bedanya sex dan gender dan ada istilah gender equity dan gender equality atau gender balance, kalau di standar eiti 2014 itu masih di level partisipasi, bagaimana agregat data mengenai sector gender, kedua adalah apakah negara mempunyai kebijakan gender di sector ekstraktif, misalnya aturan soal cuti cuti melahirkan.
- **Dadan Gunawan Syawal – Manager IA** : Sebetulnya masukan dari MSG seperti yang tadi masukannya itu akan menjadi pertimbangan kontekstual waktu MSG yang pertama. Kita tidak akan membuat opini yang tidak pada tempatnya.
- Pada bab sebelasnya ada rekomendasi. Selanjutnya 03.24.26 shet22status data laporan konekstual dari laporan kita ini, migas ada 22 data 17 data yang sudah didapat dan 5 data yang belum didapat.
- Data yang diminta itu ada minyak mentah dan gas bumi di Indonesia, jumlah WK baru, daftar kontrak gross split, daftar pengalihan PI selama 2017, daftar kontrak PSC yang akan habis sampai 2024.
- Untuk Minerba ada 30 buah data 19 data sudah didapatkan dan 11 data belum didapat, data tersebut adalah nilai ekspor batubara, jumlah kegiatan eksplorasi mineral per tahun, jumlah kegiatan eksplorasi batubara, rencana dan realisasi PPM perusahaan mineral.

4. **Dadan Gunawan Syawal – Manager IA**

- Kendala pengumpulan data, pertama ini kontekstual karena ini harus disiplin dan kualitatif juga maka permintaan data juga harus disampaikan ke beberapa instansi karena memang tidak publicate available kita sudah bekerja sama dengan sekretariat. Kemudian untuk rekonsiliasi ada 3 kategori saya sampaikan kendala pertama ada perusahaan sudah tidak beroperasi/proses pailit, tidak ada nomor teleponnya, alamat email atau datanya salah khusus untuk minerba karena ini pendatang baru juga yang tidak terupdate di data base yang sebelumnya, tidak mengangkat telepon dan dimatikan, Supervisornya tidak ditempat atau tidak dapat berbicara langsung dengan PIC, dan juga tanggapan yang diberikan yaitu sibuk atau belum ada instruksi dari direksi. Kemudian yang statusnya masih dikerjakan kendala yang kebanyakan mereka hadapi adalah BO contoh untuk perusahaan yang spect nya banyak itu butuh waktu. Kemudian yang statusnya sudah menyampaikan masih ada kendala tidak ada cap di LO pajak, kendala kedua juga tidak menyampaikan data.
- .Sepertiyang sudah saya sampaikan bahwa sudah ada tim yang sudah berangkat ke Kalimantan, ke Kalimantan Timur, kemudian Kalimantan Selatan, kemudian ke 5 perusahaan yang sedang kita kejar semoga hasilnya bagus.
- Dan ini slide yang paling penting menurut saya, jika dilihat progress hingga pagi ini Administrator Independet memohon untuk ketersediaan MSG untuk memperpanjang waktu ditengah tapi diujungnya di lock, kita tidak meminta perpanjangan waktu diujung tapi kita minta perpanjangan waktu ditengah, misalnya tanggal 15 november 2019 timelinenya laporan rekonsiliasi awal, kami propose tanggal 20 november 2019 cut off penerimaan formulir entitas pelapor apakah kami bisa memperpanjang ini sampai tanggal 20, timeline saat ini MSG meeting tanggal 25 november 2019 kita propose delay 2 hari karena kami butuh tambahan waktu untuk laporan rekonsiliasi awal yang akan

dibahas tanggal 27, tanggal 29 draft laporan EITI 2017 tidak meminta perpanjangan waktu jadi artinya dari tanggal 20 hingga tanggal 25 kami akan berjibaku selama 5hari dari pagi hingga sore, ada yang salah mengenai perpanjangan waktu ini dari tanggal 29 november 2019 menjadi tanggal 6 desember 2019, kemudian final laporan EITI 2017 tanggal 9 desember 2019 menjadi tanggal 11 desember 2019, dan MSG meeting masih tetap di tanggal 18 desember 2019.

- Pak Edi itu proposal dari kami, kami juga sudah melakukan penambahan orang dua kali lipat dari yang di proposalnya agar bisa mengejar, mohon untuk dapat diputuskan Bapak/Ibu.

5. Edi Effendi – Sekretariat EITI

- Kalau ini sudah disepakati konsekuensinya adalah kita punya SOP sebelum rapat MSG kita mengirimkan undangan dan sekaligus laporang akan kita bahas, mungkin ini juga harus bergeser undangannya bisa seminggu sebelumnya namun laporannya mungkin tidak sampai seminggu, misalkan MSG meeting tanggal 25 di geser menjadi tanggal 27 laporan awalnya tetap tanggal 25, undagannya bisa kita kirim seminggu sebelumnya tapi laporannya bisa kita kirimkan lewat email dua hari sebelumnya, temen-temen baru bisa melaporkan tanggal 25 tapi MSG meetingnya baru tanggal 27, kita sekaligus minta persetujuan kemudian juga yang draft laporan baru diserahkan tanggal 6 namun MSG meetingnya tanggal 9 final reportnya tanggal 11 dan MSG meetingnya tanggal 18 ini sudah di lihat di kalender kapan tanggal holiday karena kita harus menyesuaikan dengan agenda Pak Montty dan Pak Bastian, jika mereka available kita bisa jalan terus kalau di setuju oleh anggota MSG, bagaimana Bapak/Ibu anggota MSG.

6. Anggota MSG

- Pada prinsipnya semua anggota MSG setuju dengan permintaan pergeseran waktu Administrator Independent.

7. Dadan Gunawan Syawal – Manager IA

- Jika tidak ada pertanyaan lagi untuk kami tim Administrator Independent kami menyampaikan terimakasih khususnya persetujuan dengn pergeseran waktu, mohon maaf kalau ada yang kurang terimakasih atas dukungannya, terimakasih.

D. Penutup

- Rapat ditutup oleh Bapak Edi Effendi Tedjakusuma, Tim Leader EITI. Baik dua agenda kita hari ini sudah kita laksanakan pertama mainstreaming dan validasi EITI Indonesia dan kedua Penyusunan Laporan EITI 2017, kalau sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak/Ibu lagi kami ucapkan terimakasih.

E. Simpulan dan Saran

1. Isu-isu validasi terkait dana bagi hasil (DBH) agar dimasukkan ke dalam laporan kontekstual.
2. CSR BUMN dibawah 2.5% agar di hightlight di laporkan.
3. MSG setuju akomodasi untuk perubahan timeline pekerjaan IA.

